

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PENGAWASAN PENGGUNAAN MOBIL PRIBADI SEBAGAI
ANGKUTAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**Wisnu Mimbar Maulana
NPM : 157110479**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul **“Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru”**.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr.H.Syafrinaldi,SH.,M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Drs. H. Moris Adidi Yogya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam

menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Progam Studi Ilmu Administrasi Publik dan seluruh dosen jurusan Ilmu Administrasi yang telah memfasilitasi dan memberi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Nurmasari, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini terhadap apa yang telah diarahkan.
5. Ibu Rosmita, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini terhadap apa yang telah diarahkan.
6. Kepada Kedua Orang Tua, bapak Wagino dan ibu Sri Rezeki dan Adek Nadya Salsa Larasati karena telah memberi semangat dan dukungan baik secara moril dan materil kepada saya untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
7. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Fisipol Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.

8. Kepada teman-teman seperjuangan dalam menimba ilmu untuk merajut masa depan, terutama untuk Wiridona Rizki, Yulisa Indra Hartati, Yorenda Apri Armenita, Thesa Eciolika, Walpajri Ilhami Putra,S.Ap, Zayu Aprilio, Sandy Baskara, Tyo Ardiansyah dan teman seperjuangan angkatan 2015 terutama kelas AP D.
9. Dan kepada seluruh yang terlibat baik dalam mendukung maupun memberi sarannya kepada penulis yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau semua dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, Aamiin

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Pekanbaru, 21 Desember 2019

Penulis

Wisnu Mimbar Maulana

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL.....	iv
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan penelitian.....	14
2. Manfaat penelitian.....	14
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	17
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik.....	17
2. Konsep Organisasi.....	24

3. Konsep Manajemen	28
4. Konsep Pengawasan	31
5. Konsep Angkutan Umum	34
B. Kerangka Pemikiran.....	35
C. Konsep Operasional	36
D. Teknik Pengukuran	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel.....	42
D. Teknik Penarikan Sampel	43
E. Jenis dan Sumber Data.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Analisa Data	45
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	47
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	48
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Identitas Responden	56
B. Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	59
BAB VI PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR KEPUSTAKAAN	77
LAMPIRAN.....	79

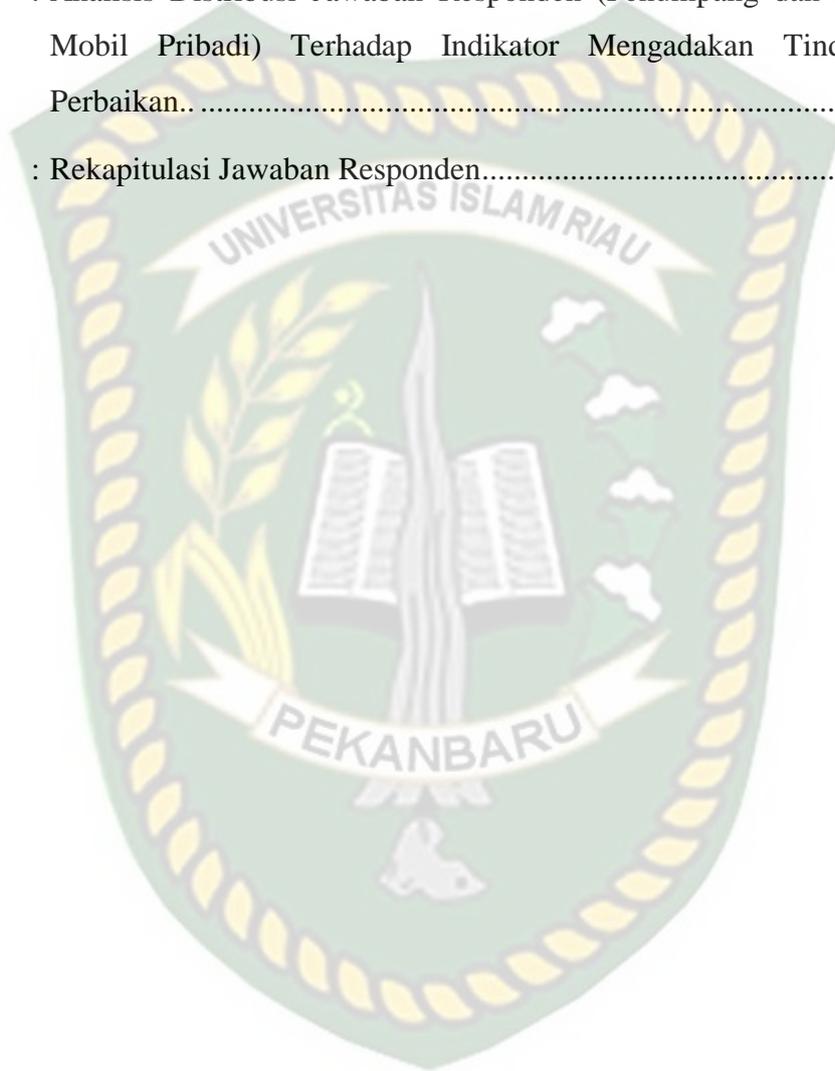


Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah Mobil Travel Berplat Hitam Dan Kuning Yang Melakukan Pelanggaran Di Kota Pekanbaru Tahun 2015-2018	10
1.2 : Data Jumlah Pelanggaran Travel Gelap Yang Tertangkap Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	11
II. 2 : Operasional Variabel Penelitian Analaisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	39
III. : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Analaisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	43
III. 1 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Analaisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	47
V.1 : Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Penelitian Tentang Analaisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	57
V.2 : Responden Berdasarkan Usia/Umur.....	58
V.3 : Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	59
V.4 : Distribusi Jawaban Responden (Penumpang dan Supir Mobil Pribadi) Terhadap Indikator Menetapkan Alat Pengukur.....	61
V.5 : Analisis Distribusi Jawaban Responden (Penumpang dan Supir Mobil Pribadi) Terhadap Indikator Menetapkan Alat Pengukur	62
V.6 : Distribusi Jawaban Responden (Penumpang dan Supir Mobil Pribadi) Terhadap Indikator Mengadakan Penilaian.....	65

V.7	: Analisis Distribusi Jawaban Responden (Penumpang dan Supir Mobil Pribadi) Terhadap Indikator Mengadakan Penilaian	66
V.8	: Distribusi Jawaban Responden (Penumpang dan Supir Mobil Pribadi) Terhadap Indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan.	68
V.9	: Analisis Distribusi Jawaban Responden (Penumpang dan Supir Mobil Pribadi) Terhadap Indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan.....	69
V.10	: Rekapitulasi Jawaban Responden.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 : Kerangka Pikir Tentang Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. : Daftar Kuisioner Untuk Supir Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum.....	80
2. : Daftar Kuisioner Untuk Penumpang Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum	83
3. : Rekapitulasi Telly Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	86
4. : Dokumentasi.....	91
5. : SK Dekan Fisipol UIR No.464/UIR-Fs/Kpts/2018 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi . Wisnu Mimbar Maulana	96
6. : Surat Rekomendasi No.503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/25942 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi	97
7. : Surat Rekomendasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru No.071/BKBP-REKOM/2019/2759 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.....	98
8. : Surat Rekomendasi Penelitian Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik No.71/A-UIR/5-FS/2019	99
9. : Surat Rekomendasi Pemerintah Kota Pekanbaru Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik No.071/BKBP-REKOM/2019/2759.....	100

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Mimbar Maulana
Npm : 157110479
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi
Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan
Kota Pekanbaru

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada dengan kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, seluruh persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benat telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Desember 2019
Pelaku Pernyataan,

Wisnu Mimbar Maulana

ANALISIS PENGAWASAN PENGGUNAAN MOBIL PRIBADI SEBAGAI ANGKUTAN UMUM OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Wisnu Mimbar Maulana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengawasan penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum atau travel ilegal merupakan salah satu permasalahan hingga kini belum tertangani dengan baik. Untuk menganalisis permasalahan tersebut Peneliti menggunakan teori Manullang sesuai dengan permasalahan tersebut menggunakan indikator penilaian yang terdiri dari, menetapkan alat pengukur, mengadakan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan. Tipe Penelitian yang berlokasi di kota Pekanbaru ini adalah surver deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian diajdikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektifitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi teliti. Terdapat dua kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu, supir mobil pribadi dan penumpang. Penumpang dalam hal ini adalah mereka yang menggunakan jasa transportasi angkutan umum. Besaran sampel yang ditetapkan dari kedua kelompok populasi ini adalah, 10 orang untuk supir mobil pribadi dan 40 orang untuk penumpang. Dua teknik sampling yang dipergunakan dalam menetapkan individu sampel adalah teknik incidental sampling untuk kelompok supir mobil pribadi dan penumpang. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisis data yang dipergunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pengawasan penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang berada pada interval penilaian cukup baik.

Kata kunci : Pengawasan, Angkutan Umum;

**ANALYSIS OF SUPERVISION OF USE OF PERSONAL CARS AS A
PUBLIC TRANSPORT BY THE DEPARTMENT OF PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

Wisnu Mimbar Maulana

This study aims to determine the analysis of the supervision of the use of private cars as public transportation by the Pekanbaru City Transportation Office in conducting surveillance of private cars that are used as public transportation or illegal travel is one of the problems so far has not been handled properly. To analyze the problem, the researcher uses the Manullang theory in accordance with the problem using an assessment indicator consisting of, setting a measuring device, conducting an assessment and carrying out corrective actions. This type of research located in the city of Pekanbaru is a descriptive survey, which prioritizes the questionnaire list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material to analyze the empirical conditions of the objectivity of the existence of the research objectives at the meticulous location. There are two population groups and samples in this study namely, private car drivers and passengers. Passengers in this case are those who use public transportation services. The sample sizes determined from these two population groups are 10 people for private car drivers and 40 people for passengers. Two sampling techniques used in determining individual samples are incidental sampling techniques for groups of private and passenger car drivers. Types and data collection techniques used consist of, primary data collected using questionnaire and interview lists and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use a frequency table tool. Based on this analysis technique the researchers assessed and concluded that the Supervision of the use of private cars as public transportation by the Pekanbaru City Transportation Office which was at a fairly good assessment interval

Keywords: Supervision, Public Transportation;

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang P. Siagian ;2008).

Sebuah organisasi selalu ditopang oleh administrasi yang berperan baik, karena dengan administrasi kegiatan yang berlangsung di dalam organisasi tersebut bisa berjalan dengan terstruktur dan sistematis. Sedangkan organisasi adalah suatu wadah dimana tempat orang-orang atau suatu kelompok menjalankan kerja sama yang di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan dan aktivitas yang didasari oleh kesepakatan bersama dalam usaha pencapaian tujuan atas pembagian-pembagian tugas yang telah ditentukan. Menurut Massie (1964;64) dalam buku Zulkifli Organisasi adalah suatu kerja sama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktifitas-aktifitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.

Apabila sebuah organisasi supaya tetap berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan maka sudah tentu harus memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan dan menjalankan organisasi, adapun ilmu itu tersebut terdapat dalam manajemen, manajemen merupakan suatu usaha atau upaya dalam pencapaian sebuah tujuan dengan cara mendayagunakan dan juga mengoptimalkan bantuan kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas

Pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh sebuah organisasi. Menurut Darwis dkk (2009;5) mengatakan bahwa manajemen lebih mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia lainnya, oleh karena itu manajemen sangat diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mendayagunakan sumber daya yang ada, maka dengan demikian diperlukan suatu konsep manajemen sumber daya manusia.

Dalam rangka pengembangan Kota Pekanbaru sebagai Provinsi Riau yang merupakan kegiatan pusat beragam, memerlukan dukungan prasarana kota yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menunjang kegiatannya dalam sehari-hari, baik yang bertujuan didalam kota maupun yang bertujuan keluar kota.

Kota Pekanbaru merupakan kota yang dinamis dan strategis jika dilihat dari letak geografisnya yang berdekatan dengan Negara Malaysia dan Singapore serta memiliki akses yang lancar di wilayah provinsi - provinsi lainnya di Indonesia. Kota Pekanbaru juga merupakan salah satu pusat pemerintahan, pusat perdagangan barang dan jasa, pusat pendidikan, dan pusat kebudayaan melayu serta kota yang baru berkembang seiring dengan pertumbuhan usia kota yang semakin tua dan ditambah lagi persaingan dengan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Seiring dengan perkembangan tersebut mengakibatkan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk baik yang datang dari luar Kota Pekanbaru maupun yang disebabkan angka kelahiran.

Sebagian besar dari orang - orang yang kreatif, telah memanfaatkan kesempatan kepadatan penduduk tersebut sebagai mata pencarian perekonomian

mereka dengan menyediakan sarana transportasi umum atau kendaraan umum. Dengan sebuah mobil mini bus, pemilik mobil menyediakan sarana antar jemput penumpang baik antar daerah maupun antar provinsi. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (UU No.22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10) .

Sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dimana setiap kendaraan umum haruslah memiliki izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam UU No 22 Tahun 2009 Pasal 173 (1) yang berbunyi: Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
- c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 5 dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Dalam hal penyediaan dan penyelenggaraan jasa layanan angkutan orang dalam trayek, pemerintah mengendalikannya dengan menerbitkan izin. Hakekat diterbitkannya izin oleh pemerintah adalah dalam rangka untuk :

1. Memberikan jaminan bagi pengguna jasa angkutan untuk mendapatkan jasa angkutan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Untuk mewujudkan kepastian pelayanan jasa angkutan umum tersebut maka setiap operator harus dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan.
2. Memberikan perlindungan kepada penyedia jasa/operator dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan angkutan dan permintaan angkutan, agar perusahaan dapat menjaga dan mengembangkan usahanya.

Biro perjalanan adalah perusahaan yang bergerak dibidang transportasi dan mengurus berbagai kebutuhan konsumen yang berhubungan dengan perjalanan seperti penyediaan tiket, penginapan, paspor, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998). Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum (UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 21). Travel dianggap sebagai salah satu cara transportasi antar daerah yang lebih nyaman dibanding dengan kereta atau bus karena tidak harus berdesakan atau berdiri sepanjang perjalanan seperti yang biasa terjadi pada transportasi kereta atau bus umum. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat maka bisnis biro perjalanan semakin marak di berbagai kota besar. Berbagai pelaku bisnis jasa ini kemudian bersaing untuk dapat menarik konsumen menggunakan jasa travel masing - masing.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan

Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Pada Pasal 15 ayat 1 bagian (C) di jelaskan kendaraan harus dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angkutan antar jemput adalah angkutan penumpang yang resmi beroperasi di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru. Angkutan antar jemput atau travel ini memiliki izin trayek atau izin beroperasi dari pemerintah yang dapat dilihat dari plat berwarna kuning serta memberikan tiket kepada penumpang. Sedangkan trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan yang tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal. Permasalahan angkutan antar jemput yang terjadi didalam Kota Pekanbaru terkait dengan apa yang yang terjadi dilapangan adalah banyak nya angkutan yang tidak memiliki izin trayek / penyimpangan izin atau banyaknya angkutan yang tidak memiliki kartu tanda pengawasan atau tanda uji berkala yang masih beroperasi di Kota Pekanbaru, baik itu Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) maupun Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Travel adalah pergerakan orang antara lokasi geografis yang relatif jauh dan dapat melibatkan perjalanan dengan berjalan kaki, sepeda, mobil dan sebagainya dan dapat menjadi salah satu cara atau round trip.

Travel atau angkutan umum kini semakin berkembang. Pada awalnya angkutan umum hanya menggunakan kendaraan bermotor sejenis bus mini. Namun seiring berkembangnya zaman dan permintaan masyarakat, angkutan

umum yang digunakan tidak hanya sejenis bus mini melainkan mobil – mobil yang digunakan orang - orang sebagai mobil pribadi. Seperti jenis mobil Kijang Inova, AVP, Avanza, Xania, Panther dan jenis mobil lainnya.

Adapun permasalahan dalam penelitian menyangkut tentang pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan, pelaksanaan pengawasan pada Dinas Perhubungan yaitu melalui seksi pengawasan lalu lintas jalan. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008, adapun tugas pokok dan fungsi bidang Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bagian ketiga paragraf 1 pasal 217 dan 218 adalah :

Pasal 217

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan mempunyai rincian tugas :

1. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
2. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran PERDA dan LLAJ, Pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum.
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota.
4. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas.
5. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas darat.
6. Melakukan pengawasan, pengendalian, dan lalu lintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.

7. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 218

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan dan melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 217 menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja.
2. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan.
3. Pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan.
4. Pengawasan kendaraan.
5. Pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang.
6. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas di ruas-ruas, persimpangan jalan dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain.
8. Berdasarkan tupoksi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dari Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Jalan, yang berkaitan dengan fenomena penulis yang pada poin ke -3 dan 6 yang berbunyi : Pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan dan Melakukan pengawasan, pengendalian, dan lalu lintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.

Adapun pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan.
- b. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota.
- c. Penyediaan perlengkapan jalan umum yang berstatus sebagai jalan kota.
- d. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
- e. Penertiban izin penyelenggaraan perparkiran
- f. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
- g. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kota.
- h. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kota.
- i. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kota.
- j. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang dalam Kota
- k. Kendaraan tidak bermotor.
- l. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan di Daerah.
- m. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam di Daerah.
- n. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya yang berada di daerah.
- o. Penertiban izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam wilayah Kota.
- p. Penertiban izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada di wilayah Kota.
- q. Sanksi administrasi.
- r. Ketentuan pidana.

Dalam pelaksanaan proses pengawasan para petugas langsung turun kelapangan dan melakukan pengawasan langsung, untuk pengawasan ini petugas pengawasan dari Dinas Perhubungan melakukan pengawasan sekitar 2-3 kali dalam sebulan. Adapun Standar Operasional Prosedur pengawasan lalu lintas sebagai berikut :

1. Melakukan pengaturan lalu lintas jalur Kawasan Tertib Lalulintas (KTL)
2. Melakukan pengaturan simpul Pagi/Sore
3. Melaksanakan penertiban angkutan umum dan barang
4. Melaksanakan penertiban terminal bayangan
5. Mengurai simpul kemacetan

Dinas Perhubungan kota Pekanbaru mempunyai tugas secara umum melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kota dalam bidang perhubungan, yang mana sebagian tugas pokok adalah membantu walikota dalam memberikan pelayanan umum dan teknis pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan. Pelayanan angkutan sewa merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak terbatas. Oleh karena itu setiap angkutan sewa yang dioperasikan harus memenuhi ketentuan / persyaratan yang berlaku. Setiap pengusaha angkutan umum yang tidak memenuhi peraturan atau surat izin akan dikenakan sanksi berupa tilang dan mobil yang bersangkutan akan ditahan sampai waktu persidangan selesai.

Tabel 1.1 : Jumlah Mobil Travel Berplat Hitam Dan Berplat Kuning Yang Melakukan Pelanggaran Di Kota Pekanbaru

No.	Tahun	Travel Berplat Hitam	Travel Berplat Kuning
1.	2015	84	27
2.	2016	66	32
3.	2017	48	-
4.	2018	15	-
Jumlah		213	59

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2019

Dari tabel 1.1 di atas pada tahun 2015 travel yang berplat hitam yang melakukan pelanggaran berjumlah 84 dan yang berplat kuning berjumlah 27 , dan pada tahun 2016 travel yang berplat hitam yang melakukan pelanggaran berjumlah 66 dan yang berplat kuning berjumlah 32, dan pada tahun 2017 travel yang berplat hitam yang melakukan pelanggaran berjumlah 48 sedangkan pada tahun 2018 travel yang berplat hitam yang melakukan pelanggaran berjumlah 15, maka dari itu jumlah travel yang berplat hitam dari tahun 2015 sampai 2018 sudah berkurang.

Dengan berbagai cara yang dilakukan oleh dinas terkait untuk menangani masalah travel gelap tersebut agar tidak semakin banyaknya berkeliaran. Seperti melakukan razia baik secara terjadwal maupun dadakan, juga melakukan penahanan dan memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Adapun standar dari uji kelaikan jalan adalah persyaratan minimum, kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin nya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

Selain itu, ada beberapa travel yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diamankan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru selama empat tahun terakhir ini yang akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2 : Data Jumlah Pelanggaran Travel Ilegal Yang Tertangkap Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Mobil	Jumlah Berdasarkan Pelanggaran				Menaikan / Menurunkan Penumpang Diluar Terminal(plat kuning)
			Tidak Memiliki Bukti Lulus Uji (Berplat Hitam)	Penyimpangan Izin Operasi (plat kuning)	Ijin Trayek (plat kuning)	Penyimpangan Izin Trayek(plat kuning)	
1.	2015	111 Unit	84	4	7	-	16
2.	2016	98 Unit	66	-	18	1	13
3.	2017	48 Unit	48	-	-	-	-
4.	2018	15 Unit	15	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2019

Dari tabel 1.2 di atas diterangkan bahwa jumlah travel gelap yang dioperasikan menjadi angkutan umum yang berhasil ditangkap oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tahun 2015 sebanyak 111 unit dan pada tahun 2016 sebanyak 98 unit, sementara pada tahun 2017 sebanyak 48 unit, dan pada tahun 2018 sebanyak 15 unit. Jadi dari jenis pelanggaran diatas travel yang tertangkap oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya travel ilegal (berplat hitam) semakin berkurang ,namun pada kenyataannya masih

banyak travel ilegal yang berkeliaran di kota Pekanbaru, para supir travel ilegal memilih untuk menghindar dari operasi razia dan lebih memilih jalan yang jarang dilakukan operasi razia yang dilakukan oleh petugas Dishub dengan Satlantas dikarenakan mereka masih banyak yang belum memiliki bukti lulus uji atau izin trayek. Cara yang dilakukan penumpang kebanyakan untuk bisa naik travel ilegal dengan cara menghubungi nomor kontak supir travel ilegal tersebut. Para supir travel ilegal tersebut akan melakukan penjemputan dimana penumpang tinggal dan akan menurunkan penumpang yang akan dituju hal ini merupakan kesalahan dan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang ada, seharusnya ada terminal yang menyediakan untuk antar jemput penumpang. Maka dari itu pihak dinas belum melakukan secara maksimal dalam pengawasan angkutan umum atau travel ilegal. Kebanyakan mobil pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum atau travel ilegal yang melanggar atau yang tertangkap ini milik pribadi sendiri. Banyak para PO travel yang sudah memiliki izin trayek memanipulasi jumlah travel yang ada dan terdaftar di Dinas Perhubungan, dan disinilah penyebab banyaknya travel ilegal berkeliaran dan berusaha ditertibkan oleh petugas yang menjadi pengawasan travel ilegal tersebut.

Dengan penjelasan mengenai travel diatas, ada istilah AKDP dan AJDP. AKDP adalah angkutan antar kota dalam Provinsi sedangkan AJDP adalah angkutan antar jemput dalam Provinsi. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan kepada AJDP, yaitu angkutan yang beroperasi dari pintu ke pintu tidak mengambil penumpang di terminal. Dan disini peneliti lebih fokus ke travel yang tidak memiliki izin trayek dan tidak memiliki bukti lulus uji jalan (berplat

hitam) travel yang berplat hitam itu tidak benar untuk beroperasi mengangkut penumpang umum karena bukan kendaraan umum.

Operasi razia yang dilakukan oleh petugas Dishubkominfo Kota Pekanbaru bersama instansi terkait (Satlantas dan POM AD) secara rutin melakukan penertiban terhadap travel ilegal, baik statis (tetap pada Pos yang telah ditentukan yaitu pos Barat, utara dan timur),

Tujuan dilakukan pengawasan tersebut adalah agar lalu lintas di Kota Pekanbaru dapat aman dan tertib, juga untuk mengurangi tindak kejahatan agar masyarakat ataupun para pengguna jasa angkutan lebih aman karena memiliki perlindungan hukum. Pengawasan sangat penting dilakukan, karena dengan adanya pengawasan kita dapat mengetahui baik penyimpangan, kejahatan dan ketidaksesuaian yang berdasarakan peraturan perundang-undangan di negara kita.

Pengawasan terhadap angkutan umum, baik angkutan barang maupun angktnan orang / travel merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Pelaksanaan pengawasan pada dinas perhubungan yaitu melalui seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan. Berdasarkan uraian tersebut penulis menemukan beberapa fenomena yang terjadi yaitu :

1. Masih adanya mobil pribadi yang berplat hitam yang masih digunakan sebagai angkutan umum seperti jenis mobil Avanza, Kijang Inova dan mobil jenis lainnya..
2. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap mobil pribadi yang berplat

hitam digunakan sebagai angkutan umum belum dilakukan secara maksimal.

3. Jumlah penumpang melebihi kapasitas berjumlah 9 orang atau lebih yang seharusnya maksimal 7 orang .

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ***“Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.”***



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu : *“Bagaimanakah Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian terhadap Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum ini adalah : Untuk menjelaskan bagaimana Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat bagi kepentingan Akademis, pengembangan ilmu administrasi Khususnya Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dalam bentuk penelitian langsung di lapangan. Disamping itu, hasil penelitian dapat semakin memperluas wawasan teori peneliti.
- b. Manfaat praktis Memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana Pengawasan

- c. Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- d. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan kajian bagi peneliti dapat dijadikan bagi keperluan analisis yang lebih mendalam dan detail.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam memperjelas arah dan tujuan penelitian ini, maka perlu diberikan beberapa konsep dan ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan yang dapat memberikan solusi yang erat kaitannya dengan masalah penelitian ini yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, agar dapat memberikan pemecahan penelitian yang jelas dalam mengetahui dan membahasnya, terutama dalam menganalisa data.

1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Menurut Siagian (2003; 2) administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Silalahi, administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (dalam Zulkifli, 2005;20). Secara teoritis dan konseptual batasan administrasi baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas (keseluruhan proses kerjasama) untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi. Sejalan dengan itu Herbert A. Simon menyebutkan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan

bersama (dalam Pasolong, 2007;2). Administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial, yang cakupannya keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

The Liang Gie mendefenisikan administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu (dalam Inu Kencana, 2003;4) . Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan tersebut, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya dalam suatu administrasi ada terdapat suatu proses kerjasama rasional serta memiliki unsur-unsur antara lain adalah : manusia, tujuan, tugas serta sarana dan prasarana.

Pasolong (2007;3) mengatakan administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional.

Zulkifli (2005;20) terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah konsep administrasi yaitu :

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
2. Bahwa dalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur ; adanya dua orang manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak dicapai; adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan; adanya perlengkapan dan

3. peralatan untuk melaksanakan tugas; dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
4. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia sudah mengenal peradaban. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan.

Sedangkan menurut Marshall Edward Dimock & Glady Ogden Dimock mengatakan administrasi publik adalah penyelenggaraan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara politis. Meskipun demikian, administrasi publik bukan sekedar teknik atau pelaksanaan program-program secara teratur, melainkan juga berkenaan dengan kebijakan umum (*policy*) karena didalam dunia modern, birokrasi merupakan pembuat kebijakan pokok dalam pemerintahan (dalam Wirman, 2012; 22).

Pelopor Administrasi Publik Modern Woodrow Wilson mendefinisikan administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintahan karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/swasta (dalam Wirman, 2012; 21).

Dari beberapa definisi administrasi publik diatas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau

lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

Dengan berbagai defenisi administrasi publik diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah proses kerjasama keompok orang yang terdiri dari aparatur negara dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pencapaian negara secara efektif dan efisien.

Sedangkan Menurut Siagian (2003;7) administrasi negara adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. Sedangkan menurut Sugandha administrasi negara adalah Merupakan sebuah proses kegiatan penetapan sasaran-sasaran serta pelaksanaan tercapainya, dengan memanfaatkan semua sumber yang tersedia guna mewujudkan tujuan negara yang dilakukan secara bekerja sama dengan dan melalui orang-orang, baik individu maupun kelompok secara terkoordinasi (dalam Amin Ibrahim, 2004; 10).

Alternatif pendekatan yang harus diimplementasikan oleh seorang administrator untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya pendekatan yang ditawarkan dalam konteks ini adalah dengan berpegangan pada prinsip yang diyakini benar. Sebagaimana dimaksud bahwa prinsip yang diyakini benar manakala dijadikan pegangan dan acuan sangat mendukung terhadap upaya pencapaian suatu hasil yang diharapkan.

Alternatif prinsip-prinsip umum administrasi yang dijumpai dalam referensi ilmu administrasi. Henry Fayol (dalam Zulkifli. 2005; 71). mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi yaitu :

1. Pembagian kerja (*division of work*). Dimaksudkan untuk memusatkan kegiatan, pengkhususan orang didalam bidangnya (spesialisasi) agar memperoleh efisiensi yang tinggi.
2. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*). Wewenang merupakan hak administrator atau manajer untuk member perintah dan merupakan sesuatu yang melekat dalam jabatan administrator atau manajer. Konsekuensi dari pemilikan wewenang tersebut adalah tanggungjawab, baik bagi yang member maupun menerima perintah. Keseimbangan antara wewenang yang didelegasikan dengan tanggungjawab perlu untuk dipertimbangkan.
3. Disiplin (*discipline*). Disiplin merupakan hal yang mutlak didalam kegiatan kerjasama, dalam hal mana anggota organisasi tunduk dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Disiplin mengikat semua tingkat kepemimpinan organisasi dan menuntut adanya sanksi.
4. Kesatuan perintah (*unity of command*). Pekerja (bawahan) menerima perintah hanya dari satu pemimpin (atasan).
5. Kesatuan arah atau tujuan (*unity of direction*). Bahwa kegiatan organisasi harus mempunyai tujuan yang sama dan langsung dari perencanaan yang dibuat oleh seorang manajer.

6. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum (organisasi) diatas kepentingan pribadi (*subordination of individual to general interest*). Dalam hal ini kepentingan organisasi sebagai kepentingan bersama harus didahulukan, bukan kepentingan pribadi.
7. Pengupahan atau penggajian (*renumeration*). Penggajian dan metode pembayarannya haru adil dan jujur sesuai dengan kompensasi pekerjaan dengan mengusahakan agar dapat memuaskan pimpinan dan bawahan.
8. Sentralisasi (*centralization*). Wewenang perlu didelegasikan kepada bawahan, tetapi tanggungjawab akhir tetap dipegang oleh pimpinan puncak (top manager). Masalahnya seberapa besar wewenang didelegasikan, disentralisasikan atau dipusatkan.
9. Skala hierarki (*scalar chain*). Skala hierarki merupakan garis wewenang dan program yang diturunkan dari pimpinan puncak ke pimpinan terbawah dan pekerja.
10. Tatatertib (*order*). Penempatan dan pendayagunaan sumber daya (orang-orang dan barang-barang) sesuai dengan tempatnya dalam suatu organisasi.
11. Keadilan (*equity*). Kesetiaan dan pengabdian anggota harus diimbangi dengan sikap keadilan dan kebaikan serta perlakuan wajar dari manajer terhadapnya.

12. Stabilitas jabatan (*stability of tenure*). Memberikan waktu yang cukup sangat diperlukan pekerja untuk menjalankan fungsinya dengan efektif, sehingga perlu mengurangi intensitas pergantian jabatan atau personal.
13. Prakarsa atau inisiatif (*inisiative*). Dalam semua tingkatan organisasi semangat kerja didukung oleh berkembangnya prakarsa, dan karenanya kepada bawahan perlu diberikan kebebasan untuk memikirkan dan mengeluarkan pendapat tentang semua aktivitas, bahkan melihat dan menilai kesalahan-kesalahan yang terjadi.
14. Solidaritas kelompok kerja (*la esprit de corps*). Prinsip ini menitikberatkan semangat persatuan dan kesatuan, perlunya kerjasama dan memelihara hubungan antar pekerja untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi kerja.

Bertitik tolak dari dasar teoritis batasan konsep administrasi menunjukkan adanya sejumlah unsur-unsur administrasi uantuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok yang bekerja sama memerlukan seperangkat instrumen yang saling terkait dan bersinergi. Seperangkat instrumen tersebut berwujud sejumlah unsur yang mutlak harus ada. Artinya tanpa adanya unsur-unsur tersebut, tujuan yang telah ditetapkan atau yang di kehendaki tidak akan tercapai. Menurut Wirman (2012; 11-13) adanya unsur-unsur administrasi adalah sebagai berikut:

1. Organisasi
2. Manajemen
3. Komunikasi

4. Kepegawaian
5. Keuangan
6. Perbekalan
7. Tata usaha
8. Hubungan Masyarakat

2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Administrasi dan organisasi saling berkaitan satu dengan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai maka perlu adanya tempat (wadah) untuk bekerja sama dan tempat inilah yang dinamakan organisasi. Para sarjana ilmu administrasi semakin banyak memberikan perhatian kepada organisasi sebagai suatu proses meskipun perhatian terhadapnya sebagai wadah kegiatan kerja tetap penting. sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu pendelegasian wewenang, pengawasan, dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas.

Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat. Seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan. Siagian (2003;6)

Dalam suatu organisasi terdapat sekelompok orang yang melakukan aktivitas dalam sebuah organisasi dengan menggunakan seni tertentu untuk

tercapainya tujuan yang telah di sepakati melalui orang lain. Administrasi dapat berjalan dengan adanya batuan dari orang yang mau terlibat di dalamnya yang disebut sebagai manajemen.

Menurut Waldo Organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi. (dalam Syafie, 2003;114).

Selanjutnya menurut Darwis, dkk (2009;11) yang mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu wadah dari unsur-unsur administrasi yang lainnya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Zulkifli (2005:74) mengemukakan bahwa konsep organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerjasama, dan juga mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas, penunjukan staf, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Chester L. Bernard mendefenisikan organisasi adalah sebuah sistem tentang aktivitas kerjasama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi (dalam Sjamsuddin Indradi 2006; 19). Menurut Zulkifli (2005; 131) yang mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan juga jenisnya adalah bersifat dinamis dan juga terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang datang dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Banyak yang mendefenisikan pengorganisasian menurut Siswanto mengatakan bahwa pengorganisasian adalah berdasarkan deskripsi tentang

organisasi, pengorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antarpekerjaan yang efektif diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien”(Siswanto, 2005; 75).

Administrasi dan manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama organisasi dapat dipandang sebagai wadah, dan kedua organisasi dapat dipandang sebagai proses seperti dikemukakan Siagian (2003; 96) organisasi adalah tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan, sedangkan organisasi sebagai proses adalah proses menyoroti interaksi antara orang-orang didalam organisasi itu.

Hubungan formal antara orang-orang dalam organisasi pada umumnya telah diatur dalam dasar hukum pendirian organisasi dan pada struktur organisasi serta hierarki yang terdapat dalam organisasi. Sebaliknya hubungan informal antara orang-orang didalam organisasi tidak diatur dalam dasar hukum pendirian organisasi. Dalam suatu organisasi prinsip amat diperlukan, terutama dapat dijadikan pedoman sehingga organisasi menjadi tumbuh dan berkembang. Menurut Siswanto (2005; 98) prinsip organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Organisasi dan Tujuan

Prinsip ini menunjukkan terdapatnya hubungan yang erat antara organisasi dan tujuan. Organisasi dirancang untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, tujuan hanya mungkin dapat direalisasikan manakala melalui sarana organisasi.

2. Esensi Organisasi

Prinsip yang penting adalah bahwa tanggung jawab pengorganisasian maupun tanggung jawab pelaksanaan selalu bersifat individual. Tanggung jawab didelegasikan dari seseorang kepada orang lain. Individu yang menerima tanggung jawab membentuk suatu kewajiban yang juga bersifat pribadi.

3. Tanggung Jawab dan Otoritas

Prinsip ini berarti bahwa otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab, artinya seseorang yang diberi tanggung jawab harus juga diberi otoritas untuk melaksanakan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi tanggung jawab mereka.

4. Spesialisasi untuk Efisiensi

Organisasi yang efektif membagi tanggung jawab dalam bagian sehingga mengadakan spesialisasi dan menambah efisiensi dalam masing-masing bagian tersebut.

5. Rentang Kendali

Rentang kendali adalah tingkat pengendalian atau tingkat delegasi tanggung jawab. Prinsip ini menganggap bahwa terdapat batas tertentu terhadap jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer.

Sedangkan menurut Nawawi (2008; 13) mengatakan bahwa dalam sebuah organisasi terdapat unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan yang utuh agar sebuah organisasi dapat berjalan, adapun unsur-unsur pokok dalam sebuah organisasi adalah :

1. Manusia, yaitu : yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menghimpun diri dalam suatu wadah.
2. Filsafat, yaitu : manusia yang menghimpun diri dalam organisasi dengan hakekat kemanusiaannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama.
3. Proses, yaitu : kerjasama dalam sebuah organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan.
4. Tujuan, yaitu : Organisasi didirikan manusia adalah oleh karena adanya kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakekat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik

Apabila sebuah organisasi supaya tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan maka sudah tentu harus memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan dan menjalankan organisasi, adapun ilmu atau strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen, yang mana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya dalam pencapaian sebuah tujuan dengan cara mendayagunakan dan juga mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh sebuah organisasi.

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan prespektif yang berbeda.

Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam (human and natural resources) secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan (Siswanto. 2005; 9).

Selanjutnya dari penjelasan di atas Siswanto (2005; 2) memberi batasan definisi manajemen yaitu manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Ralph C. Davis (Dalam Burhanuddin, 2014 ;21) manajemen adalah fungsi dari pada setiap pimpinan eksekutif.

Menurut Stoner manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, dan menggunakan semua sumber daya manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli, 2005; 28).

Batasan manajemen hingga saat ini belum ada keseragaman, namun selalu dan digunakan adalah : Ketatalaksanaan, manajemen, *management* dan pengurusan. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, maka kita pakai istilah aslinya yaitu “Manajemen” mengandung tiga pengertian:

- Manajemen sebagai suatu proses.
- Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen.
- Manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

Manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat, sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan fenomena-fenomena (gejala-gejala), kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, jadi memberikan penjelasan-penjelasan.

Kemudian menurut Darwis dkk (2009; 5) yang mengatakan bahwa manajemen lebih mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia lainnya, oleh karena itu manajemen sangat diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mendayagunakan sumber daya yang ada, maka dengan demikian diperlukan suatu konsep manajemen sumber daya manusia.

Arti manajemen sebagai ilmu dan seni didasarkan pada pandangan yang menyatakan bahwa seorang ilmuwan sekaligus seniman, karena disamping mengandalkan diri pada ilmu, ia juga harus mempunyai firasat, keyakinan, kreativitas, dan menguasai cara-cara penerapannya.

G.R Terry mengatakan, secara esensial seorang manajer adalah seorang ilmunan dan seniman. Ia memerlukan suatu pengetahuan yang dapat disusun menurut sistem yang memberikan kebenaran-kebenaran pokok yang dapat digunakan dalam mengoperasikan pekerjaannya (dalam Siswanto. 2005; 10).

Suatu proses merupakan suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lainnya saling bersusulan. Proses adalah suatu cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam suatu organisasi. Rangkaian aktivitas dimaksudkan adalah merupakan fungsi seorang manajer. Fungsi manajer tersebut membentuk suatu proses keseluruhan. Menurut Handoko (2009; 6) manajemen

dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen:

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak pihak yang harus berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, supplier, serikat kerja, assosiasi perdagangan, masyarakat, dan pemerintahan.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektifitas.

4. Konsep Pengawasan

Pengawasan menurut Manullang (2001:173) adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Sondang. P. Siagian (2004:5) mengemukakan bahwa Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk

menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan adalah fungsi manajemen yang juga mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi perencanaan. Ini berarti bahwa pengawasan tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa kegiatan perencanaan, dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Menurut Handoko (2003 : 26) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan merupakan elemen tugas-tugas manajerial, dan ia mencakup tindakan pengukuran dan perbaikan (koreksi) peforma pihak yang diawasi guna memastikan bahwa sasaran-sasaran, intruksi yang dikeluarkan dilaksanakan secara efisien dan berjalan lancar. Jadi dari beberapa konsep diatas pengawasan dapat disimpulkan suatu proses pemeriksaan dan pengkoreksian atau perbaikan yang mana berfungsi menjamin rencana organisasi berjalan dengan yang telah ditentukan dan mencapai tujuan organisasi.

Menurut Manullang (2001:173) pengawasan itu mempunyai beberapa proses yaitu:

1. Menetapkan alat pengukur (standar)

Standar harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya dan bawahan harus mengetahui benar alat penilai (standar) yang digunakan untuk menilai pekerjaannya. Secara garis besar standar dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Standar dalam bentuk fisik adalah standar yang digunakan untuk menilai dan mengukur hasil pekerjaan bawahan dan bersifat nyata tidak dalam bentuk uang, seperti kualitatif dan kuantitatif serta waktu.
 - b. Standar dalam bentuk uang standar yang digunakan untuk menilai hasil pekerjaan bawahan dalam bentuk jumlah uang dalam bentuk biaya, jumlah penghasilan dan investasi.
 - c. Standar intangible adalah standar yang diukur dalam bentuk fisik dan bentuk uang.
2. Mengadakan penilaian (evaluate) yaitu membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standar yang telah ditetapkan . pekerjaan bawahan dapat diketahui dari hasil laporan tertulis atau dari pimpinan langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan.
 3. Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action) yaitu tindakan yang diambil untuk menyelesaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan pengawasan menurut Hasibuan (2006 : 242) meliputi:

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
2. Melakukan tindakan perbaikan (corrective), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (deviasi).
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

Sehingga dapat disimpulkan tujuan pengawasan adalah untuk memperbaiki atau mencegah adanya kesalahan, penyimpangan-penyimpangan atau penyelewangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan untuk menghindari kerugian-kerugian yang dilakukan sejak suatu pekerjaan dimulai, sedang dikerjakan maupun setelah selesai pekerjaan dilakukan.

5. Konsep Angkutan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan dijelaskan bahwa pemindahan orang atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan, sedangkan kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

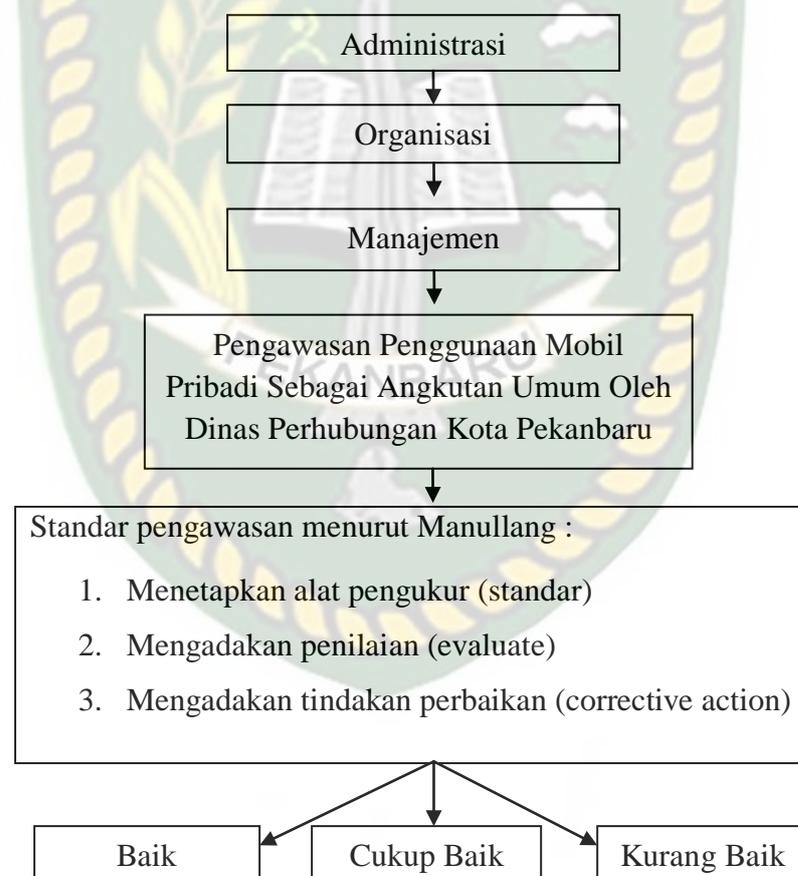
Angkutan umum adalah merupakan salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama sama dengan membayar tarif. Angkutan umum adalah angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus dsb). (Warpani, 1990).

Biro perjalanan adalah perusahaan yang bergerak dibidang transportasi dan mengurus berbagai kebutuhan konsumen yang berhubungan dengan perjalanan seperti penyediaan tiket, penginapan, paspor, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998). Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum (UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 21).

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait di dalam variabel penelitian. Kerangka pikir pada variabel penelitian ini tentang Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Secara lebih rinci dapat dilihat pada bagan yang di gambarkan dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Gambar I.1 : Kerangka Pikir Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



Sumber : *Modifikasi Penulis 2019*

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah merupakan batasan dalam penulisan yang merupakan pokok bahasan berikutnya, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan selanjutnya. Untuk memudahkan analisa maka penulis memberikan batasan secara jelas mengenai ruang lingkup penelitian dan dalam pengoperasiannya menggunakan konsep-konsep. Adapun konsepnya adalah :

- a. Administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.
- b. Organisasi merupakan suatu wadah dari unsur-unsur administrasi yang lainnya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, dan menggunakan semua sumber daya manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah di tetapkan.
- d. Pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

1. Menetapkan alat pengukur (standar)

Standar harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya dan bawahan harus mengetahui benar alat penilai (standar) yang digunakan untuk menilai

pekerjaannya. Secara garis besar standar dapat digolongkan sebagai berikut:

- Standar dalam bentuk fisik adalah standar yang digunakan untuk menilai dan mengukur hasil pekerjaan bawahan dan bersifat nyata tidak dalam bentuk uang, seperti kualitatif dan kuantitatif serta waktu.
- Standar dalam bentuk uang standar yang digunakan untuk menilai hasil pekerjaan bawahan dalam bentuk jumlah uang dalam bentuk biaya, jumlah penghasilan dan investasi.
- Standar intangible adalah standar yang diukur dalam bentuk fisik dan bentuk uang.

2. Mengadakan penilaian (evaluate) yaitu membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standar yang telah ditetapkan . pekerjaan bawahan dapat diketahui dari hasil laporan tertulis atau dari pimpinan langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan.

3. Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action) yaitu tindakan yang diambil untuk menyelesaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

e. Angkutan Umum adalah merupakan salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama sama dengan

membayar tarif.

- f. Tidak memiliki lulus uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu Uji dan tanda Uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- g. Penyimpangan izin operasi adalah suatu kesalahan dimana yang seharusnya tidak dilakukan izin operasi tersebut.
- h. Ijin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
- i. Penyimpangan izin trayek adalah kesalahan mobil penumpang umum yang tidak memiliki izin pada trayeknya atau melanggar dari trayek lintasan.
- j. Menaikan atau menurunkan penumpang diluar terminal adalah permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam antar jemput penumpang di terminal.

Table II.2 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Pengawasan menurut Manullang (2001:173) adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.	Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	<p>1. Menetapkan alat pengukur (standar) .</p> <p>2. Mengadakan penilaian (evaluate)</p> <p>3. Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action)</p>	<p>a. Intensitas pengawasan</p> <p>b. Kualitas pengawasan</p> <p>c. Waktu pengawasan</p> <p>a. Laporan tertulis yang dibuat</p> <p>b. Langsung mengunjungi untuk memberikan intruksi</p> <p>c. Isi dan pertanggung jawaban laporan lisan</p> <p>a. Tindakan korektif yang dilakukan</p> <p>b. Sanksi yang diambil</p> <p>c. Kebijakan dalam ketegasan sanksi</p>	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p> <p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p> <p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>

Sumber : modifikasi penulis 2019

D. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik.

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator.

1. Ukuran Variabel

Baik	:	Apabila penilaian terhadap indikator Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 67%-100%
Cukup Baik	:	Apabila penilaian terhadap indikator Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 34%-66%
Kurang Baik	:	Apabila penilaian terhadap indikator Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 0%-33%

2. Ukuran Indikator Variabel

a. Menetapkan alat pengukur (standar).

Baik	:	Apabila penilaian terhadap indikator Menetapkan alat ukur atau standar pengawasan berada pada skala 67%-100%
------	---	--

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Menetapkan alat ukur atau standar pengawasan berada pada skala 34%-66%

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap indikator Menetapkan alat ukur atau standar pengawasan berada pada skala 0%-33%

b. Mengadakan penilaian (evaluate)

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator mengadakan penilaian (evaluasi) berada pada skala 67%-100%

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator mengadakan penilaian (evaluasi) berada pada skala 34%-66%

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap indikator mengadakan penilaian (evaluasi) berada pada skala 0%-33%

c. . Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action)

Baik : Apabila penilaian terhadap indikator mengadakan tindakan perbaikan berada pada skala 67%-100%

Cukup Baik : Apabila penilaian terhadap indikator mengadakan tindakan perbaikan berada pada skala 34%-66%

Kurang Baik : Apabila penilaian terhadap indikator mengadakan tindakan perbaikan berada pada skala 0%-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe peneliti yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survey deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan dan mengklasifikasikan serta menganalisisnya sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Tujuan penggunaan tipe ini adalah untuk mengetahui secara jelas dan konkret tentang analisis pengawasan dengan metode penelitian kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, alasan peneliti memilih lokasi ini karena dari sekian Kabupaten atau Kota di Provinsi Riau maka Kota Pekanbaru lah yang menjadi pusat transportasi khususnya mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum.

C. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiono (2003:90) adalah wilayah generasi yang sendiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.

Sampel menurut Sugiono (2003:91) merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Maka sampel penelitian Kepala Dinas dan kepala seksi pengawasan lalu lintas jalan, supir mobil pribadi

dan penumpang mobil pribadi yang menggunakan jasa transportasi di kota Pekanbaru.

Tabel III. : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

No	Jenis Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Dinas Perhubungan	1	1	100%
2.	Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan	1	1	100%
3.	Supir Mobil Pribadi	18	10	100%
4.	Penumpang Mobil Pribadi	~	40	~
Jumlah			52	

Sumber : Data Olahan Peneliti 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun penarikan sampel yang digunakan dalam pemilihan sampel untuk aparaturnya Pemerintah adalah memakai *purpose sampling* yaitu penulis menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, Kepala Dinas sebagai Key Informan dan yang jelas pada intinya mereka yang terpilih dapat mewakili terhadap populasi yang ada sehingga akan bisa menjawab pokok permasalahan yang penulis angkat, sedangkan untuk supir travel dan penumpang digunakan *Teknik Insidental Sampling* yaitu pemilihan sampel pada waktu tertentu di lokasi penelitian dengan alasan banyaknya jumlah responden sehingga hanya supir travel dan penumpang yang di temui penulis yang dijadikan sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut (Riduwan, 2010; 97) :

- a) Data primer, yaitu data yang dihimpun langsung dari sumber pertama. Pengumpulan data dilakukan dengan mempergunakan wawancara. Berupa tanggapan key informan dan informan yang digunakan untuk mengetahui Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- b) Data sekunder yang diperoleh dari data olahan yang telah dipublikasikan, baik yang berasal dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru., jurnal penelitian terdahulu, dan buku-buku penunjang yang relevan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian adalah teknik :

1. Questioner , yaitu mempersiapkan dan mempergunakan daftar berupa pertanyaan yang diajukan kepada responden yang diberikan pertanyaan-pertanyaan dan alternatif jawaban. Sasaran dari teknik questioner ini adalah seluruh responden.
2. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan informasi secara menyeluruh dan mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti.

3. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan penelitian menggunakan pancaindra.
4. Dokumentasi, yaitu data yang penulis peroleh dari penyalinan buku-buku, arsip, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan bupati, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang digunakan (Moleong, 2005; 103).

Analisis data menurut Paton adalah proses mengatur pengurutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar dan membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan antara dimensi- dimensi uraian (Moleong, 2005; 203).

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data dikelompokan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk analisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada obyek penelitian sebagaimana adanya suatu analisa yang berusaha memberikan

gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (*pekan*) yang didirikan oleh para pedagang Minangkabau di tepi Sungai Siak pada abad ke-18. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah.

Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi

para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Hal ini tak lepas dari peran Sultan Siak ke 4 Sultan Alamuddin Syah yang memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762 demi untuk menghindari campurtangan Belanda ke dalam urusan keluarga kerajaan, setelah sebelumnya beliau berhasil menaiki tahta dengan menggeser keponakannya Sultan Ismail dengan bantuan Belanda. Pekan yang beliau bangun di tempat ini kemudian didukung oleh akses jalan yang menghubungkan dengan daerah-daerah penghasil lada, gambir, damar, kayu, rotan, dan lain-lain. Jalan tersebut menuju ke selatan sampai ke Teratak Buluh dan Buluh Cina dan ke barat sampai ke Bangkinang terus ke Rantau Berangin. Pengembangan pekan ini kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Ali. Di zamannya, pekan baru ini menjadi bandar yang sangat ramai sehingga lama kelamaan nama Pekanbaru lebih dikenal daripada Senapelan. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

1. Geografi

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara

bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 °C hingga 35,6 °C, dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C. Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh.

Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

2. Kependudukan

Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatra, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 40,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai bahasa pergaulan yang umum digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru, selain Bahasa Indonesia. Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Batak. Perpindahan ibu kota

Provinsi Riau dari Tanjung pinang ke Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja *romusha* dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi. Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini makin menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan,

terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi "Penguasa Perang Riau Daratan".

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas perhubungan adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan dibidang perhubungan di daerah.

Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 oktober 1988 sesuai dengan surat keputusan Menteri Perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat disektor perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan perekonomian di indonesia khususnya kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pembangunan nasional. Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), kemudian adanya UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 yang menjadi dasar dari otonomi daerah, terbitlah Perda No. 7 Tahun 2001 membuat dinas ini terganti menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

1. Tugas Dan Fungsi Instansi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas - dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

2. Fungsi Dinas

- Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
- Pembinaan dan pelaporan;
- Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain.

3. Visi Dan Misi

Visi :

- a. "Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau"

Misi :

- b. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;
- c. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
- d. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, dan sistem jaringan transportasi;

- e. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan

4. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka sejumlah tujuan dan sasaran yang lebih terarah juga perlu ditetapkan. Adapun tujuan dan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Perhubungan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sektor Perhubungan dan Kesekretariatan;
2. Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
3. Melaksanakan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
4. Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Angkutan;
5. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
6. Tersedianya fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai;
7. Optimalnya kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Terlaksananya kegiatan penataan tower di Kota Pekanbaru

Adapun Sasaran dan yang ingin dicapai adalah :

1. Aparatur Perhubungan yang profesional;
2. Terencana dan termonitornya penyelenggaraan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;

3. Terpeliharanya peralatan beserta kantor pengujian, pelabuhan dan terminal serta sarana dan prasarana perhubungan;
4. Terjadinya peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat;
5. Penataan dan pengembangan trayek angkutan umum, penataan dan pengembangan koridor Trans Metro, pembangunan Halte Bus dan Pengadaan Bus, Terminal Barang, Pelabuhan Tenayan, Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor, Gedung Parkir dan Penataan Pedestrian Sudirman;
6. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, marka jalan, dan pagar pengaman jalan;
7. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan Mobil Crane;
8. Tersedianya menara telekomunikasi yang dimanfaatkan secara bersama dengan tatanan yang teratur dalam ruang wilayah kota.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam bab ini akan disajikan data hasil penelitian yang telah dilakukan berupa hasil kuisisioner tentang indikator Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, serta analisa jawaban terhadap pertanyaan tentang Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Dalam penyajian data hasil penelitian ini diuraikan berbagai aspek yaitu, profil responden. Data ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden sehingga dapat memahami situasi penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum . Kedua, gambaran penilaian tentang analisis pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Ketiga, deskripsi hasil kuisisioner yang disebarkan pada responden dilanjutkan dengan analisis data yang sudah diperoleh dipadukan dengan hasil wawancara yang diperoleh dari responden. Data responden meliputi pertanyaan tentang jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir kepada semua responden yang terpilih.

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah unsure genetika dari para responden yang menilai Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 : Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Penelitian Tentang Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

No.	Kelompok Responden	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	DISHUB Pekanbaru	2	-	2
2.	Supir	10	-	10
3.	Masyarakat	19	21	40
Jumlah		31	21	52
Presentase		59.6%	40.4%	100%

Sumber : Olahan Data Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel V.1 diatas diketahui bahwa dari 52 orang responden sebanyak 31 orang atau 59.6% adalah responden laki-laki dan 21 orang atau 40.4% adalah responden perempuan.

2. Berdasarkan Usia

Usia responden yang telah ditetapkan dalam penelitian untuk mengetahui Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel V.2 : Responden Berdasarkan Usia/Umur Pada Penelitian Tentang Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

No.	Usia	Kelompok Responden			Jumlah	Presentase
		DISHUB Pekanbaru	Supir	Masyarakat		
1.	20-30 Tahun	-	2	14	16	30.8%
2.	31-40 Tahun	-	4	13	17	32.7%
3.	41-50 Tahun	2	2	6	10	19.2%
4.	>51 Tahun	-	2	7	9	17.3%
Jumlah		2	10	40	52	100%

Sumber : *Olahan Data Hasil Penelitian 2019*

Dari tabel V.2 diatas dapat dilihat diketahui bahwa responden yang berusia 20 – 30 tahun sebanyak 16 orang responden dengan presentase 30.8% dari jumlah responden, sedangkan responden yang berusia 31 – 40 tahun sebanyak 17 orang responden dengan presentase 32.7% dari jumlah responden. Responden yang berusia 41 – 50 tahun sebanyak 10 orang responden dengan presentase 19.2% dari jumlah responden dan responden yang berusia lebih 50 tahun sebanyak 9 orang responden dengan presentase 17.3% dari seluruh jumlah responden.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan terakhir responden yang melakukan penilaian terhadap Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Tabel V.3 : Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Penelitian Tentang Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

N o.	Responden	Kelompok Responden			Jumlah	Presentase
		DISHUB Pekanbaru	Supir	Masyarakat		
1.	SD	-	-	6	6	11.5%
2.	SMP	-	6	8	14	26.9%
3.	SMA	-	4	26	30	57.7%
4.	S1	2	-	-	2	3.9%
Jumlah		2	10	40	52	100%

Sumber : *Olahan Data Hasil Penelitian 2019*

Dari tabel V.3 diatas dapat diketahui bahwa dari tingkat pendidikan responden sangat bervariasi untuk responden yang berpendidikan SD sebanyak 6 orang dengan presentase 11.5% dari jumlah responden, SMP sebanyak 14 orang dengan presentase 26.9% dari jumlah responden, SMA sebanyak 30 orang dengan presentase 57.7% dari jumlah responden, S1 sebanyak 2 orang dengan presentase 3.9% dari jumlah responden.

B. Hasil Penelitian Terhadap Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Menetapkan Alat Pengukur (standar)
2. Mengadakan Penilaian (evaluate)
3. Mengadakan Tindakan Perbaikan (corrective action)

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk itu ditelaah satu persatu untuk mengetahui seberapa baik pengawasan penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum di Pekanbaru.

1. Menetapkan alat pengukur (standar)

Standar harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya dan bawahan harus mengetahui benar alat penilai (standar) yang digunakan untuk menilai pekerjaannya. Secara garis besar standar dapat digolongkan sebagai berikut:

- Standar dalam bentuk fisik adalah standar yang digunakan untuk menilai dan mengukur hasil pekerjaan bawahan dan bersifat nyata tidak dalam bentuk uang, seperti kualitatif dan kuantitatif serta waktu.
- Standar dalam bentuk uang standar yang digunakan untuk menilai hasil pekerjaan bawahan dalam bentuk jumlah uang dalam bentuk biaya, jumlah penghasilan dan investasi.
- Standar intangible adalah standar yang diukur dalam bentuk fisik dan bentuk uang.

Tabel V.4 : Distribusi Jumlah Jawaban Responden (Supir dan Penumpang) Terhadap Indikator Menetapkan Alat Pengukur Tentang Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

No.	Item Yang Dinilai	Jawaban Responden			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Intensitas Pengawasan	13	30	9	52
2.	Kualitas Pengawasan	12	36	4	52
3.	Waktu Pengawasan	14	9	29	52
Jumlah		39	75	42	156

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel V.4 diatas dapat diketahui dari sub-sub indikator Menetapkan alat pengukur , responden memberikan penilaian atas pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut :

Pertanyaan pertama yaitu mengenai intensitas pengawasan, responden menjawab baik sebanyak 13 orang, responden yang menjawab cukup baik sebanyak 30 orang, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 9 orang. Pertanyaan kedua mengenai kualitas pengawasan, responden menjawab baik sebanyak 12 orang, responden yang menjawab cukup baik sebanyak 36 orang, dan responden yang menjawab kurang baik 4 orang.

Pertanyaan ketiga mengenai waktu pengawasan, responden menjawab baik sebanyak 14 orang, responden yang menjawab cukup baik sebanyak 9 orang dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 29 orang.

Tabel V.5 : Analisis Distribusi Jawaban Responden (Supir dan Penumpang) Terhadap Indikator Menetapkan Alat Pengukur.

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
		Skor (3)	Skor(2)	Skor(1)	
1.	Intensitas Pengawasan	39	60	9	108
2.	Kualitas Pengawasan	36	72	4	112
3.	Waktu Pengawasan	42	18	29	89
Total Skor					309

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Dari tabel diatas dan teknik penghitungan penelitian yang digunakan yaitu :

Skor tertinggi : $52 \times 3 = 156$

Skor indikator : $156 \times 3 = 468$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Indikator}} \times 100 = \frac{309}{468} \times 100 = 66\%$$

Berdasarkan hasil analisis distribusi jawaban responden mengenai menetapkan alat pengukur sebanyak 66 % sehingga dapat dikatakan cukup baik karena berada diantara 34-66%.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan yaitu Bapak Bambang Armanto S.H pada tanggal 07 Oktober 2019 pukul 13:30 WIB mengenai indikator menetapkan alat pengukur adalah :

“Menurut beliau tentang menetapkan alat pengukur yaitu standar harus ditetapkan terlebih dahulu sesuai dengan SOP yang ada, dan peraturan yang ada untuk menangani masalah travel ilegal ini agar tidak semakin banyaknya berkeliaran. Seperti melakukan razia baik secara terjadwal maupun dadakan, dalam satu bulan kami melakukan razia 1-3 kali. Dalam pembagian tugas kami langsung menugaskan personil untuk kelapangan, misalnya kami tegak dijalan sebagian personil tegak dipos atau meja petugas untuk melihat angkutan umum yang ilegal apabila ada yang melakukan pelanggaran petugas akan memberikan sanksi dan penahanan surat-surat dan dokumennya, pihak Dinas sudah melakukan penindakan terhadap angkutam umum yang ilegal yang tidak memiliki bukti lulus uji dan tidak memiliki izin trayek di kota Pekanbaru ”.

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang penulis lakukan dilokasi penelitian serta data yang diberikan oleh responden dari indikator menetapkan alat pengukur, sesuai dengan peneliti jumpai dilapangan terhadap bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dishub beberapa tahun terakhir ini sudah jarang dilakukan dikarenakan kurangnya personil yang akan turun kelapangan dan baik pihak perusahaan maupun dari individu masyarakatnya tidak pernah jera dengan apa yang dilakukan dan salah satu yang memicu maraknya angkutan umum yang ilegal yang melanggar aturan tersebut adalah masyarakat pengguna jasa, sebab masyarakat ikut serta dalam menyelenggarakan jasa angkutan tersebut.

Dari uraian data tabel diatas, data hasil wawancara atau kuisisioner serta hasil pengamatan dilapangan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kegiatan dalam menetapkan alat pengukur merupakan Standar harus ditetapkan terlebih dahulu

sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya dan bawahan harus mengetahui benar alat penilai (standar) yang digunakan untuk menilai pekerjaannya

Menetapkan alat pengukur yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu intensitas pengawasan, kualitas pengawasan, waktu pengawasan . Dinas Perhubungan Pekanbaru dalam mengadakan penilaian yang telah diuraikan diatas, walaupun masih banyak kekurangan dalam melakukan indikator menetapkan alat pengukur, akan tetapi indikator menetapkan alat pengukur menurut penulis berada pada kategori cukup baik karena sudah melakukan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap travel ilegal yang berkeliaran di kota Pekanbaru.

2. Mengadakan Penilaian (evaluate)

yaitu membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standar yang telah ditetapkan . pekerjaan bawahan dapat diketahui dari hasil laporan tertulis atau dari pimpinan langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan.

Tabel V.6 : Distribusi Jumlah Jawaban Responden (Supir dan Penumpang) Terhadap Indikator Mengadakan Penilaian Pada Penelitian Tentang Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

No.	Item Yang Dinilai	Jawaban Responden			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Laporan tertulis yang dibuat	11	24	17	52
2.	Langsung mengunjungi untuk memberikan intruksi	14	27	11	52
3.	Isi dan pertanggung jawaban laporan lisan	12	23	17	52
Jumlah		37	74	45	156

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel V.6 diatas dapat diketahui dari sub-sub indikator mengadakan penilaian, responden memberikan penilaian atas pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut :

Pertanyaan pertama yaitu mengenai laporan tertulis yang dibuat, responden menjawab baik sebanyak 11 orang, responden yang menjawab cukup baik sebanyak 24 orang, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 17 orang. Pertanyaan kedua mengenai Langsung mengunjungi untuk memberikan laporan lisan, responden menjawab baik sebanyak 14 orang, responden yang menjawab cukup baik sebanyak 27 orang, dan responden yang menjawab kurang baik 11 orang. Pertanyaan ketiga mengenai Isi dan pertanggung jawaban laporan lisan, responden menjawab baik sebanyak 12 orang, responden yang menjawab cukup baik sebanyak 23 orang dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 17 orang.

Tabel V.7: Analisis Distribusi Jawaban Responden (Supir dan Penumpang) Terhadap Indikator Mengadakan Penilaian.

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
		Skor (3)	Skor(2)	Skor(1)	
1.	Laporan tertulis yang dibuat	33	48	17	98
2.	Langsung mengunjungi untuk memberikan intruksi	42	54	11	107
3.	Isi dan pertanggung jawaban laporan lisan	36	46	17	99
Total Skor					304

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Dari tabel diatas dan teknik penghitungan penelitian yang digunakan yaitu :

Skor tertinggi : $52 \times 3 = 156$

Skor indikator : $156 \times 3 = 468$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Indikator}} \times 100 = \frac{304}{468} \times 100 = 65\%$$

Berdasarkan hasil analisis distribusi jawaban responden mengenai mengadakan penilaian sebanyak 65 % sehingga dapat dikatakan cukup baik karena berada diantara 34-66%. Berdasarkan hasil wawancara Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan yaitu Bapak Bambang Armanto S.H pada tanggal 07 Oktober 2019 pukul 13:30 WIB mengenai indikator Mengadakan Penilaian adalah :

“ Menurut beliau tentang mengadakan penilaian tersebut dengan cara membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standar yang ditetapkan oleh dinas.laporan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh

petugas harus sesuai dengan kejadian yang terjadi serta isi laporan harus bisa dipertanggung jawabkan misalnya petugas pernah melaporkan tentang pelanggaran terhadap angkutan umum atau travel ilegal tentang jumlah penumpang yang melebihi kapasitas yang seharusnya maksimal berjumlah 6-7 orang tetapi jumlah penumpang lebih dari kapasitas dan saya selalu ikut andil dalam melakukan pengawasan untuk memberikan intruksi tersebut serta supir yang melakukan pelanggaran akan dilakukan penyuluhan dan pembinaan”.

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang penulis lakukan dilokasi penelitian serta data yang diberikan oleh responden dari indikator mengadakan penilaian, sesuai dengan peneliti jumpai dilapangan masih adanya sebagian petugas yang tidak melaporkan seluruh kejadian pelanggaran seperti membuat pasal atau aturan yang berlaku terhadap pelanggar angkutan umum yang ilegal dan petugas tidak ada melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap supir yang melakukan pelanggaran. Serta atasan dari dinas tersebut jarang pernah ada ditempat kejadian untuk memberikan intruksi kepada petugas. Dan juga ditemukan bahwa petugas DISHUB melakukan razia tanpa dampingan dengan kepolisian (satlantas).

Dari uraian data tabel diatas, data hasil wawancara atau kuisisioner serta hasil pengamatan dilapangan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kegiatan dalam mengadakan penilaian merupakan membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standar yang telah ditetapkan . pekerjaan bawahan atau petugas yang melakukan pengawasan dapat diketahui dari hasil laporan tertulis atau dari pimpinan langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan.

Mengadakan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu laporan tertulis yang dibuat, langsung mengunjungi untuk memberikan intruksi dan isi pertanggung jawaban laporan lisan. Dinas Perhubungan Pekanbaru dalam mengadakan penilaian yang telah diuraikan diatas, walaupun masih banyak kekurangan dalam melakukan indikator mengadakan penilaian, akan tetapi indikator mengadakan penilaian menurut penulis berada pada kategori cukup baik karena sudah melakukan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap travel ilegal yang berkeliaran di kota Pekanbaru.

3. Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action)

yaitu tindakan yang diambil untuk menyelesaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel V.8 : Distribusi Jumlah Jawaban Responden (Supir dan Penumpang) Terhadap Indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan Pada Penelitian Tentang Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

No.	Item Yang Dinilai	Jawaban Responden			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Tindakan korektif yang dilakukan	9	36	7	52
2.	Sanksi yang diambil	10	38	4	52
3.	Kebijakan dalam ketegasan sanksi	8	27	17	52
Jumlah		27	101	28	165

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel V.8 diatas dapat diketahui dari sub-sub indikator mengadakan tindakan perbaikan, responden memberikan penilaian atas pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut :

Pertanyaan pertama yaitu mengenai Tindakan korektif yang dilakukan, responden menjawab baik sebanyak 9 orang, responden yang menjawab cukup baik sebanyak 36 orang, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 7 orang. Pertanyaan kedua mengenai Sanksi yang diambil, responden menjawab baik sebanyak 10 orang, responden yang menjawab cukup baik sebanyak 38 orang, dan responden yang menjawab kurang baik 4 orang. Pertanyaan ketiga mengenai Kebijakan dalam ketegasan sanksi, responden menjawab baik sebanyak 8 orang, responden yang menjawab cukup baik sebanyak 27 orang dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 17 orang.

Tabel V.9: Analisis Distribusi Jawaban Responden (Supir dan Penumpang) Terhadap Indikator Mengadakan Tindakan Perbaikan .

No.	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
		Skor (3)	Skor(2)	Skor(1)	
1.	Tindakan korektif yang dilakukan	18	72	7	97
2.	Sanksi yang diambil	30	76	4	110
3.	Kebijakan dalam ketegasan sanksi	24	54	17	90
Total Skor					297

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Dari tabel diatas dan teknik penghitungan penelitian yang digunakan yaitu :

Skor tertinggi : $52 \times 3 = 156$

Skor indikator : $156 \times 3 = 468$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Indikator}} \times 100 = \frac{297}{468} \times 100 = 63\%$$

Berdasarkan hasil analisis distribusi jawaban responden mengenai mengadakan tindakan perbaikan sebanyak 63 % sehingga dapat dikatakan cukup baik karena berada diantara 34-66%.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan yaitu Bapak Bambang Armanto S.H pada tanggal 07 Oktober 2019 pukul 13:30 WIB mengenai indikator Mengadakan tindakan perbaikan adalah :

“Menurut beliau tentang mengadakan tindakan perbaikan yaitu tindakan yang kita ambil harus sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan ketentuan yang berlaku apabila ada supir yang melakukan pelanggaran di jalanan akan kita berikan sanksi yang sesuai dengan diberikan nya sanksi atau penilangan surat-surat maka para supir akan memiliki efek rasa jera. Dinas sudah memberikan kemudahan dalam mengurus surat-surat perizinan untuk uji bukti lulus kepada para supir angkutam umum agar bisa mengikuti peraturan yang ada. Untuk menciptakan ketertiban angkutan umum harus melalui proses yang panjang pula, dimulai dari prosedur kinerja, sampai kepada penerapan sanksi atau teguran ataupun denda tilang, langkah penertiban harus segera diambil ketika peraturan yang sudah diberlakukan tersebut dilanggar oleh jasa angkutan umum yang ilegal dan tidak akan melakukan pelanggaran lagi serta dapat mengurangi travel ilegal yang berkeliaran di Pekanbaru”.

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang penulis lakukan dilokasi penelitian serta data yang diberikan oleh responden dari indikator mengadakan tindakan perbaikan, sesuai dengan peneliti jumpai dilapangan sebagian oknum petugas Dishub dengan salah satu pelanggar peraturan untuk melakukan aksi dengan damai ditempat selesai itu surat-surat dikembalikan kembali. Serta sulitnya perusahaan maupun individu untuk mengurus surat perizinan terhadap angkutan umum yang illegal menjadi legal dikarenakan biaya yang terlalu mahal bagi para supir yang memiliki angkutan umum sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada, seharusnya diberikan sanksi yang tegas agar angkutan umum yang ilegal tidak marak berkeliaran di kota Pekanbaru.

Dari uraian data tabel diatas, data hasil wawancara atau kuisisioner serta hasil pengamatan dilapangan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kegiatan dalam mengadakan tindakan perbaikan merupakan tindakan yang diambil untuk menyelesaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mengadakan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu Tindakan korektif yang dilakukan, Sanksi yang diambil, Kebijakan dalam ketegasan sanksi. Dinas Perhubungan Pekanbaru dalam mengadakan tindakan perbaikan yang telah diuraikan diatas, walaupun masih banyak kekurangan dalam melakukan indikator mengadakan tindakan perbaikan, akan tetapi indikator mengadakan tindakan perbaikan menurut penulis berada pada kategori cukup baik karena sudah melakukan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap travel ilegal yang berkeliaran di kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk melihat hasil keseluruhan dari Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V. 10: Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

No.	Variabel	Indikator	Presentase
1.	Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum	1. Menetapkan Alat Pengukur	66 %
		2. Mengadakan Penilaian	65 %
		3. Mengadakan Tindakan Perbaikan	63 %
Total			194 %
Rata-rata			64.6%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

Dari hasil tabel diatas dijelaskan mengenai Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat disimpulkan masuk dalam kategori Cukup Baik sesuai dengan penjelasan dibab dua tentang presentase sebesar 34-66% masuk pada kategori Cukup Baik artinya belum semua indikator terlaksana dengan baik.

Penilaian tentang indikator Menetapkan alat ukur sudah penulis jelaskan di atas yang berada pada kategori cukup baik, hal ini dikarenakan petugas Dinas Pengawasan sudah melakukan standar alat ukur yang sesuai dengan SOP yang

berlaku serta petugas melakukan pengawasan dalam sebulan bisa 1-3 kali baik terjadwal maupun dadakan, serta yang melakukan pelanggaran akan ditertibkan oleh petugas.

Kemudian untuk indikator mengadakan penilaian berada pada kategori penilaian cukup baik karena petugas sudah melaporkan semua kejadian dilapangan sesuai dengan kenyataan yang ada serta nanti yang akan dilaporkan akan dilakukan evaluasi agar yang terjadi terhadap pelanggaran travel ilegal tersebut dapat berkurang secara maksimal.

Selanjutnya pada indikator mengadakan tindakan perbaikan sudah tergambar di atas sudah berjalan cukup baik. Dalam hal ini petugas sudah sesuai dengan tindakan dan sanksi yang diambil terhadap UU yang berlaku terhadap para supir yang melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah agar membuat efek jera dan demi ketertiban lalu lintas di kota Pekanbaru.

Pemerintah juga beserta segala pihak yang terkait dalam pengawasan mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum atau travel ilegal di kota Pekanbaru telah memberikan upaya yang terbaik agar terciptanya kenyamanan terhadap masyarakat khususnya penumpang dan supir travel.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Analisis Pengawasan Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian dan saran bagi pihak yang berkepentingan dan terkait khususnya Pengawasan Angkutan Umum yang dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

A. Kesimpulan

Pengawasan mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan kegiatan terencana dan terarah dari pemerintah kota Pekanbaru unruk menciptakan ketertiban lalu lintas yang tidak melanggar aturan yang berlaku.

1. Menetapkan Alat Pengukur

Dalam melakukan pengawasan pihak dinas telah menetapkan standar operasional prosedur agar travel yang tanpa izin trayek (travel ilegal) di kota Pekanbaru pihak dinas sudah melakukan razia secara rutin maupun dadakan dalam sebulan 1-3 kali. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah travel ilegal yang berkeliaran namun yang terjadi beberapa tahun terakhir pihak dinas sudah jarang melakukan razia secara rutin sementara kendala dari dinas dikarenakan kurangnya personil yang ikut turun kelapangan dalam hal ini penilaian ini masuk kategori cukup baik.

2. Mengadakan Penilaian

Pengawasan terhadap angkutan umum yang ilegal ini memang harus ada laporan yang dibuat oleh petugas untuk atasan yang secara nyata atau terjadi langsung, laporan terhadap surat-surat dan kelengkapan ataupun laporan yang melanggar undang-undang yang berlaku agar bisa di evaluasi terlebih dahulu. Namun pada dasarnya laporan tersebut tidak semua yang dilaporkan sesuai dengan kejadian tersebut dalam hal ini penilaian masuk dalam kategori cukup baik.

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Dinas perhubungan melakukan razia sudah berjalan cukup baik terhadap angkutan umum yang ilegal harus bertindak tegas dan adil serta sanksi yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini diberikan agar para pelanggar memiliki efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi serta pihak Dinas Perhubungan harus melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap supir yang melanggar peraturan tersebut.

Tujuan dilakukan pengawasan tersebut adalah agar lalu lintas di Kota Pekanbaru dapat aman dan tertib, juga untuk mengurangi tindak kejahatan agar masyarakat ataupun para pengguna jasa angkutan lebih aman karena memiliki perlindungan hukum. Pengawasan sangat penting dilakukan, karena dengan adanya pengawasan kita dapat mengetahui baik penyimpangan, kejahatan dan ketidaksesuaian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan menemukan masalah – masalah yang terjadi, penulis memberikan beberapa saran dan upaya yang dapat dijadikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan Pengawasan Angkutan Umum (travel ilegal) di Kota Pekanbaru, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi atas permasalahan yang terjadi di Pekanbaru terhadap angkutan umum yang ilegal atau tidak memiliki izin trayek perlu tambahan personil yang turun kelapangan, sarana dan prasarana serta anggaran yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat mempelancar dalam penertiban angkutan umum (travel ilegal) dikota Pekanbaru. Sanksi yang diberikan haruslah setegas mungkin agar angkutan umum tanpa izin trayek dapat berkurang jumlahnya dan jera untuk mengoperasikan angkutan tersebut.
2. Dalam melakukan perizinan perusahaan maupun izin angkutan pihak terkait tidak mempersulit pembuatan izin kepada masyarakat yang ingin membuat surat izin perusahaan maupun izin trayek. Dan untuk kepentingan masyarakat, pihak terkait perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya nya angkuta umum tanpa izin trayek (travel ilegal) yang tidak memiliki surat izin tersebut. Dengan demikian dapat menghasilkan dampak yang baik, sehingga secara kuantitas angkutan umum yang ilegal yang beroperasi di Pekanbaru akan semakin berkurang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Faried. 2010. *Teori Dan Konsep Administrasi*. Makassar : PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Burhanuddin. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dilembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Darwis, Eni Yulinda, dan Lamun Bathara, 2009. *Dasar-dasar manajemen*, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pelatihan Universitas Riau.
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, H. Melayu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kencana, Inu Syafei. 2003. *Sitem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Kusdi, 2009, *Teori Organisasi dan Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Manulang. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda Karya
- Nawawi, Hadari. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Nurmasari, Zukifli. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh
- Pasolong Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Riduwan. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Rosady, Ruslan. 2007. *Manajemen Publik Relation & Media Komunikasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*, Jakarta : Erlangga
- Sjamsuddin, Indradi. 2006. *Dasar-dasar dan Teori Admnnistrasi Publik*. Malang : Agitek YPN.
- Siswanto, HB. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Siagian, Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sufian, Hamim. 2003. *Administrasi Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Terry, George R. 2014. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru : UIR Press.
- Zulkifli. 2009. *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Pekanbaru
- Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa Fakultas Ilmu Dan Ilmu Politik*. Pekanbaru : Badan Penerbit Fisipol UIR

Dokumentasi :

- UU No. 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
- Peraturan Walikota Pekanbaru, Nomor 17 Tahun 2008 tentang *Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bagian ketiga paragraf 1 pasal 217 dan 218*
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang *Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)*
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang *Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek*.